

Katalog: 9201001.8202

INDIKATOR EKONOMI

**KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH**

2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

INDIKATOR EKONOMI

**KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH**

2018

Indikator Ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah 2018

ISBN: 978-602-662-147-4

No. Publikasi: 82020.1923

Katalog: 9201001.8202

Ukuran Buku: 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: xii + 60 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Desain Cover:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Ilustrasi Cover:

Tower Listrik Pelabuhan Weda

Sumber Ilustrasi:

-

Diterbitkan oleh:

© BPS Kabupaten Halmahera Tengah

Dicetak oleh:

CV. Tara Taro

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Indikator Ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah 2018

Pengarah :

Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penanggung Jawab Umum :

Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penanggung Jawab Teknis :

Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penyunting :

Fauzan Jodie Aldrian, S.Tr.Stat.

Penulis :

Radita Nareswari Mumpuni Putri, S.Tr.Stat.

Pengolah Data :

Radita Nareswari Mumpuni Putri, S.Tr.Stat.

Desain :

Radita Nareswari Mumpuni Putri, S.Tr.Stat.

KATA PENGANTAR

Buku Indikator Ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah 2018 ini adalah kelanjutan dari publikasi sebelumnya yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Halmahera Tengah.

Publikasi ini bertujuan antara lain untuk melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah dari tahun ke tahun dengan harapan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program, khususnya di bidang ekonomi.

Data yang disajikan dalam publikasi ini berupa tabel-tabel perkembangan harga, keuangan daerah, produksi, dan pendapatan regional serta potensi wisata. Bahan-bahannya dikumpulkan dan diolah oleh BPS Kabupaten Halmahera Tengah dan sebagian di antaranya merupakan data sekunder yang diperoleh dari dinas-dinas terkait.

Saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan publikasi selanjutnya. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi pengguna data khususnya pemerhati masalah perekonomian.

Weda, Desember 2019

Kepala Badan Pusat Statistik

Kabupaten Halmahera Tengah



Iwan Fajar Prasetyawan, SST., M. Si

NIP. 19800628 200212 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	3
B. Maksud dan Tujuan.....	4
C. Sistematika Penyajian	4
BAB 2 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5
BAB 3 INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI DAN INFLASI	15
A. Indeks Kemahalan Konstruksi	17
B. Inflasi.....	23
BAB 4 KEUANGAN DAN PERBANKAN	29
A. Keuangan Daerah	31
B. Pajak dan Retribusi.....	34
BAB 5 PRODUKSI.....	39
A. Tanaman Pangan.....	41
B. Hortikultura.....	41
C. Perikanan	42
D. Perkebunan	44
E. Kehutanan.....	45
BAB 6 AKOMODASI DAN PARIWISATA	47
BAB 7 TRANSPORTASI.....	55
A. Transportasi Darat	57
B. Transportasi Udara.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Lima Lapangan Usaha Halmahera Tengah (persen), 2014–2018.....	9
Tabel 2.	Distribusi PDRB dalam Lapangan Usaha (Persentase/%)	11
Tabel 3.	Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014-2018	12
Tabel 4.	Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tengah Tahun 2018	22
Tabel 5.	IHK dan Laju Inflasi Halmahera Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran, 2018.....	28
Tabel 6.	Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (miliar rupiah), 2017-2018.....	33
Tabel 7.	Persentase Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Jenis Penerimaan, 2017-2018.....	37
Tabel 8.	Persentase Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Jenis Pengeluaran, 2017-2018.....	38
Tabel 9.	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Halmahera Tengah, 2016 dan 2017.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2014-2018.....	13
Gambar 2. Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran, Tahun 2018	26
Gambar 3. Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Bulan, Tahun 2018	27
Gambar 4. Peta Kabupaten Halmahera Tengah	57
Gambar 5. Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Halmahera Tengah, 2018	58

<https://haltengkab.bps.go.id>

BAB 1

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Menciptakan kondisi masyarakat dengan keadaan yang lebih baik merupakan tujuan dari pembangunan suatu daerah baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dampak pembangunan daerah sendiri merupakan perwujudan dari upaya bangsa dalam melaksanakan strategi pembangunan nasional secara terpadu dan menyeluruh. Salah satu fokus pembangunan daerah adalah pembangunan daerah yang baru dibentuk akibat adanya pemekaran wilayah.

Kabupaten Halmahera Tengah merupakan kabupaten yang mengalami pemekaran pada tahun 2003 menjadi dua kabupaten dan satu kota yaitu menjadi Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan. Setelah pemekaran terjadi, ibukota Kabupaten Halmahera Tengah yang dahulunya adalah Kota Tidore Kepulauan berpindah ke Kota Weda yang notabene merupakan kota baru. Hal ini menyebabkan pembangunan menjadi hal mutlak untuk digalakkan, baik pembangunan fisik wilayahnya maupun pembangunan sumber daya manusianya.

Pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah tentunya harus diawali dengan tahap perencanaan yang memerlukan informasi serta data yang lengkap, akurat dan tepat untuk menghindari resiko yang besar juga kesalahan dalam pembangunan suatu daerah. Informasi serta data tersebut dapat juga sebagai evaluasi keberhasilan dari pembangunan suatu daerah baik secara mikro maupun makro. Oleh karena itu, dibutuhkan satu indikator yang dapat menggambarkan keberhasilan dan perkembangan ekonomi dari suatu daerah.

Indikator Ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 merupakan kumpulan data statistik yang diharapkan mampu memberikan gambaran sampai sejauh mana keberhasilan atau perkembangan perekonomian masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah yang telah dicapai. Publikasi ini

disusun berdasarkan data-data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait dan juga survei yang telah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan publikasi Indikator Ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah 2018 adalah menyajikan data statistik ekonomi yang lengkap sehingga bermanfaat sebagai dasar penyusunan dan perumusan kebijakan yang akan diambil, serta digunakan untuk penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih tepat dan terarah serta sebagai bahan evaluasi dari kebijakan yang telah dilaksanakan maupun hasil yang telah dicapai.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Publikasi ini terbagi menjadi tujuh bab. Bab pertama berisikan pendahuluan, yang berisi pengenalan tentang Indikator Ekonomi. Bab kedua membahas mengenai neraca keuangan (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Halmahera Tengah. Bab ketiga berisi tentang Indeks Kemahalan Konstruksi dan Inflasi Halmahera Tengah. Bab keempat membahas mengenai keuangan daerah dan perbankan. Dalam pembahasan mengenai keuangan daerah, dijelaskan tentang bagaimana realisasi keuangan Halmahera Tengah selama satu tahun, meliputi pendapatan dan pengeluaran. Bab kelima berisi tentang produksi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan serta kehutanan. Bab keenam membahas tentang potensi wisata Kabupaten Halmahera Tengah yang dapat dikembangkan serta jasa akomodasi sebagai penunjang kegiatan wisata. Bab terakhir membahas tentang perkembangan transportasi di Kabupaten Halmahera Tengah.

<https://halimngkab.bps.go.id>

BAB 2

Produk Domestik

Regional Bruto

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB merupakan alat atau pendekatan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan perkembangan nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masing-masing sektor ekonomi dalam suatu kurun waktu di wilayah tertentu.

Perubahan demi perubahan telah banyak terjadi pada tatanan global dan lokal dan memiliki pengaruh terhadap perekonomian nasional selama beberapa tahun terakhir. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam *System of National Accounts 2008 (SNA 2008)* melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables (SUT)*.

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan. Terdapat dua macam penghitungan PDRB, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada kurun waktu tersebut, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang

dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar (tahun 2010) yang selanjutnya disebut sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat distribusi dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi.

Selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2014-2018, perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, yaitu : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Industri Pengolahan.

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan pertumbuhan perekonomian tahun sebelumnya. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2018 sebesar 6,82 persen yang artinya selama tahun 2018 telah terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,82 persen. Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,97 persen dan mengalami peningkatan sebesar 0,85 persen pada tahun 2018. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Tengah beriringan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,17 persen. Meskipun angka ini masih berada di bawah target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 yaitu sebesar 5,4 persen, peningkatan sebesar 0,1 persen telah dicapai jika dibandingkan dengan tahun pertumbuhan ekonomi tahun 2017 yaitu 5,07 persen.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha dengan Persentase Lima Terbesar Kabupaten Halmahera Tengah (persen), 2014–2018

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertambangan dan Penggalan	-28,47	-3,96	1,42	10,66	9,99
2	Industri Pengolahan	8,56	5,36	280,01	12,83	13,03
3	Transportasi dan Pergudangan	8,26	8,55	4,32	8,93	8,61
4	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,42	2,47	3,34	8,68	9,10
5	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,61	8,14	4,75	6,85	8,88
PDRB		-1,90	4,34	11,24	5,97	6,82

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Publikasi PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Lapangan Usaha Halmahera Tengah 2014-2018

Berdasarkan tabel 1, ada lima lapangan usaha yang memiliki persentase laju PDRB terbesar jika dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya. Lapangan usaha tersebut antara lain Pertambangan dan Penggalan, Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Lapangan usaha dengan pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2018 adalah industri pengolahan yaitu mencapai 13,03 persen. Industri pengolahan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 12,83 persen. Peningkatan ini didukung oleh beroperasinya *smelter* yang dipakai untuk pengolahan biji nikel di Kecamatan Pulau Gebe, kemudian hasilnya diekspor keluar negeri. Sementara itu, lapangan usaha pertambangan dan

penggalian mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 persentase laju pertumbuhan PDRB sebesar 9,99 persen, sedangkan pada tahun 2017 persentasenya mencapai angka 10,66 persen.

Dari lima lapangan usaha dengan persentase laju pertumbuhan terbesar secara keseluruhan, terdapat tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif. Ketiga lapangan usaha tersebut adalah Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Adapun dua lapangan usaha lainnya yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu Pertambangan dan Penggalian, Transportasi dan Pergudangan.

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,08 persen pada tahun 2018, tumbuh secara positif jika dibandingkan tahun 2017 yang memiliki persentase sebesar 2,52 persen. Pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2018 mengalami pertumbuhan negatif. Pada tahun 2017, persentasenya mencapai 8,21 persen sedangkan pada tahun 2018 mencapai 1,68 persen.

Jasa Keuangan dan Asuransi pada tahun 2018 mengalami laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,02 persen, lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2017 dengan persentase sebesar 1,67 persen. Pada tahun 2018, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial memiliki persentase laju pertumbuhan sebesar 8,88 persen. Sektor ini mengalami pertumbuhan positif jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang persentasenya mencapai 6,85 persen. Sektor Jasa lainnya juga mengalami pertumbuhan positif, pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonominya memiliki persentase sebesar 7,54 persen sedangkan pada tahun 2017 persentasenya sebesar 4,67 persen.

Tabel 2. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2014-2018

	Kategori	2014	2015	2016	2017*	2018**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,94	26,71	25,46	24,34	22,62
B	Pertambangan dan Penggalian	17,50	15,10	13,79	15,42	17,96
C	Industri Pengolahan	2,69	2,70	8,41	8,91	10,24
F	Konstruksi	7,89	8,19	7,74	7,87	7,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,96	15,93	14,96	14,88	14,60
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	20,03	21,17	19,92	18,80	17,26
	Lapangan Usaha Lainnya	9,99	10,2	9,72	9,78	9,44
Total		100	100	100	100	100

Sumber: Publikasi PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Lapangan Usaha Halmahera Tengah 2014-2018

Terhitung sejak tahun 2014, perekonomian di Kabupaten Halmahera Tengah didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, yaitu : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Industri Pengolahan. Hal ini terlihat dari besaran persentase pada tabel 2 untuk masing-masing sektor.

Berdasarkan tabel 2, sektor yang memiliki peranan terbesar terbesar bagi perekonomian di Kabupaten Halmahera Tengah adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan persentase sebesar 22,62 persen. Sektor

Pertambangan dan Penggalian memiliki persentase terbesar kedua dengan persentase 17,96 persen.

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat, dimana pendapatan perkapita ini dapat didekati dengan PDRB Per kapita. Walaupun demikian, PDRB per kapita ini juga tidak secara langsung dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan/kemakmuran suatu kelompok masyarakat. Oleh karena PDRB per kapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk di daerah tersebut, maka PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya dua variabel tersebut. Dengan kata lain, jika nilai PDRB besar sedangkan jumlah penduduknya sedikit maka PDRB per kapitanya akan menjadi besar, sebaliknya apabila nilai PDRB kecil sedangkan jumlah penduduknya besar maka PDRB per kapitanya akan menjadi kecil.

Tabel 3. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014-2018

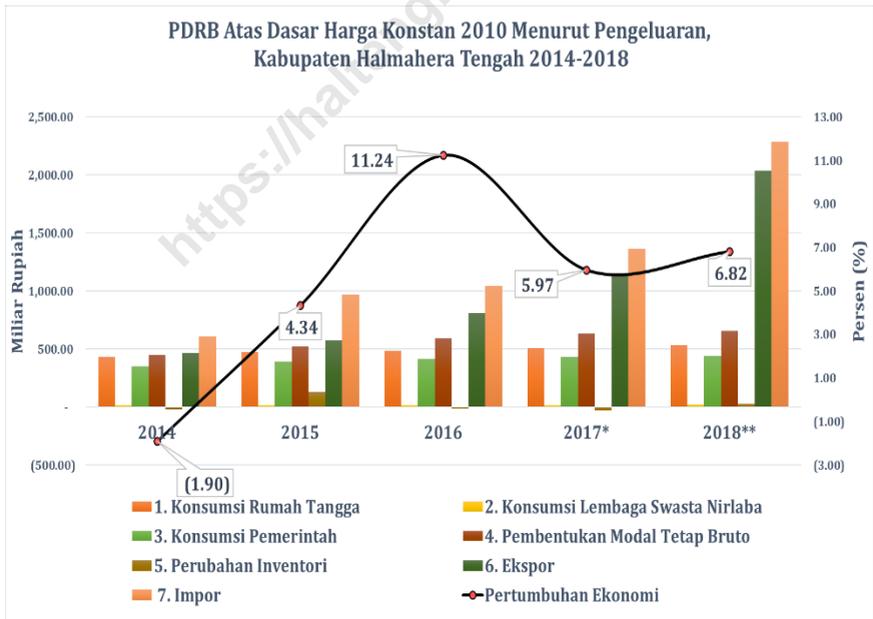
Uraian	2014	2015	2015	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB perkapita (Juta Rp)					
- ADHB	28,94	30,99	34,47	36,57	39,64
- ADHK 2010	22,46	22,78	24,59	25,32	25,80
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	(4,61)	1,42	7,96	2,96	1,89
Jumlah penduduk (000 org)	48 414	49 807	51 315	52 813	55 370

Sumber : Publikasi PDRB Halmahera Tengah menurut Pengeluaran 2014-2018

Pada tahun 2018, PDRB per kapita Kabupaten Halmahera Tengah mencapai 39,64 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 1,89 persen. Sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK), PDRB per kapita Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 sebesar 25,80 juta rupiah.

Selain penghitungan menurut berbagai sektor di lapangan usaha, PDRB juga dihitung menurut komponen pengeluarannya yaitu :

1. Pengeluaran Komponen Rumah Tangga
2. Pengeluaran Komponen LNPR
3. Pengeluaran Komponen Pemerintah
4. Perubahan Inventor dan PMTB
5. Net Ekspor (Ekspor-Impor)



Gambar 1. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2014-2018

Sumber: PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2018

Pada gambar 1 terlihat pertumbuhan nilai ekspor dan impor tahun 2017 hingga 2018 di Kabupaten Halmahera Tengah memiliki pertumbuhan positif yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meningkatnya pertumbuhan ekspor diimbangi dengan meningkatnya pertumbuhan impor. Hal ini tentunya dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baik jika pengelolaan dilakukan secara efektif dan efisien baik oleh pemerintah maupun berbagai *stakeholder* terkait dalam menangani kekayaan alam berupa mineral yang ada di Halmahera Tengah.

<https://haltengkab.bps.go.id>

<https://tengkab.bps.go.id>

BAB 3

Indeks Kemahalan Konstruksi dan Inflasi

A. INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

Salah satu cara untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di semua daerah adalah diterapkannya kebijakan otonomi daerah. Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara efektif dan efisien. Tujuan lain dari kebijakan ini adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga ketimpangan antar daerah dapat teratasi. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola keuangan daerah dengan baik dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah(PAD) juga ikut meningkat.

Penerapan pembangunan yang telah terdesentralisasi memerlukan suatu indikator sebagai perimbangan keuangan daerah otonom. Salah satu dana perimbangan tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan instrumen transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah. Ada beberapa komponen dalam perumusan Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia (IPM), luas wilayah, PDRB per kapita, dan indeks kemahalan konstruksi (IKK).

Indeks Kemahalan Konstruksi(IKK) merupakan komponen penting dalam perumusan Dana Alokasi Umum(DAU). IKK juga digunakan untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah. Semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), karenanya, didasarkan atas suatu pendekatan atau kompromi tertentu. Misalnya yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan model. Untuk menghitung

Indeks Kemahalan Konstruksi dibutuhkan beberapa komponen data yaitu data harga konstruksi yang meliputi harga bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat berat konstruksi, upah jasa konstruksi, dan data bobot/diagram timbang umum IKK kabupaten/kota berupa nilai masing-masing bahan bangunan utama yang dibutuhkan untuk membangun 1 unit bangunan per satuan ukuran luas dari 5 kelompok jenis bangunan.

Penghitungan IKK sudah dilakukan sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah BoQ tahun 2003. Perkembangan teknik sipil sangat cepat ditambah lagi dengan pesatnya industri bahan bangunan. Saat ini, material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan dan kusen aluminium. Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Beberapa hal tersebut mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, penghitungan IKK tahun 2018 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan *up to date* yaitu menggunakan BoQ sampai tahun 2017.

IKK tahun 2018 menggunakan data harga komoditi konstruksi, sewa alat berat dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam 4(empat) periode pencacahan yaitu Juli 2017, Oktober 2017, Januari 2018, dan April 2018. Seperti halnya IKK tahun 2017, IKK tahun 2019 menggunakan 4 periode pencacahan dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi. Periode pencacahan tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi, sehingga lebih menggambarkan fluktuasi harga di bidang konstruksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya menggunakan dua periode pencacahan. Kota acuan penghitungan IKK 2018 adalah Kota Semarang.

Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components (BOCC)*. Metode pendekatan ini didesain untuk tujuan perbandingan antar wilayah. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah.

Komponen konstruksi adalah output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini adalah semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan. Tujuan penggunaan pendekatan BOCC adalah memberikan perbandingan harga konstruksi yang lebih sederhana dan biaya yang murah dan memungkinkan menggunakan metode *Bill of Quantity (BoQ)*.

Pendekatan BOCC didasarkan pada harga 2 jenis komponen, yakni komponen gabungan dan input dasar. Selanjutnya untuk tujuan estimasi perbandingan antar wilayah, komponen-komponen tersebut dikelompokkan dalam bentuk sistem-sistem konstruksi. Sistem-sistem tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam *basic heading*.

Sektor konstruksi diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yang disebut sebagai *basic heading* yaitu:

1. Gedung Bangunan
2. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
3. Bangunan Lainnya

Gedung dan bangunan yang termasuk dalam lingkup penghitungan diagram timbang IKK adalah sebagai berikut:

1. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, *real estate*, rumah susun, dan perumahan dinas.

2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun dan bangunan monumental.

Klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan yang termasuk dalam penghitungan diagram timbang adalah sebagai berikut:

1. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian
 - a. Bangunan pengairan, meliputi: pembangunan waduk (*reservoir*), bendungan(*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, *check dam*, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, *krib*, dan *viaduk*.
 - b. Bangunan tempat proses hasil pertanian, meliputi: bangunan penggilingan, dan bangunan pengeringan.
2. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan
 - a. Bangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.
 - b. Bangunan jalan dan jembatan kereta meliputi pembangunan jalan dan jembatan kereta.
 - c. Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.
3. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi
 - a. Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi dan transmisi tegangan tinggi.
 - b. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.

- c. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, meliputi: pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
- d. Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/penerima radar *microwave*, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.
- e. Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah dan saluran drainase pada gedung.
- f. Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
- g. Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
- h. Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
- i. Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.

Sedangkan jenis bangunan yang tercakup dalam klasifikasi bangunan lainnya yaitu bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi prefab dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

Secara umum pada tahun 2018, IKK Kabupaten Halmahera Tengah yakni sebesar 121,44 menempati posisi ke-3 tertinggi se-provinsi Maluku Utara. Secara implisit, hal ini menggambarkan bahwa secara umum, harga barang-barang konstruksi yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bangunan per satuan ukuran luas di Kabupaten Halmahera Tengah tergolong tinggi apabila

dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. Hal ini tentunya bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam hal perencanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik, bagi usaha sektor perdagangan bahan konstruksi serta bagi pelaku usaha sektor konstruksi di Kabupaten Halmahera Tengah.

Tabel 4. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tengah Tahun 2018

Kabupaten/ Kota		IKK
(1)	(2)	
1. Kabupaten Halmahera Barat		110,61
2. Kabupaten Halmahera Tengah		121,44
3. Kabupaten Kepulauan Sula		132,24
4. Kabupaten Halmahera Selatan		110,95
5. Kabupaten Halmahera Utara		112,35
6. Kabupaten Halmahera Timur		108,11
7. Kabupaten Pulau Morotai		118,37
8. Kabupaten Pulau Taliabu		130,38
9. Kota Ternate		115,91
10. Kota Tidore Kepulauan		107,97

Sumber : Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2018

Banyak faktor yang memengaruhi harga barang dan jasa di suatu wilayah. Selain sisi permintaan dan penawaran, juga terdapat faktor lain seperti jumlah pedagang besar di suatu kota, kondisi jalan yang mempengaruhi jalur distribusi, jarak ke tempat asal barang, dan lain-lain. Kabupaten Halmahera Tengah mendapatkan sebagian besar bahan bangunan/konstruksi dari Manado melalui jalur laut menuju Pelabuhan Laut Weda. Sebagian besar bahan lainnya berasal dari Ternate melalui jalur laut menuju pelabuhan Sofifi dan dilanjutkan melalui jalur darat menuju ibukota Halmahera Tengah di Weda.

B. INFLASI

Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian dimana harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Penyebab terjadinya inflasi secara umum adalah jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada yang diperlukan. Jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya adalah sebagai berikut:

1. Inflasi Ringan : Inflasi berada dibawah 10 persen per tahun. Jenis inflasi ini masih belum terlalu mengganggu keadaan ekonomi dan masih mudah untuk dikendalikan.
2. Inflasi Sedang : Inflasi berada antara 10-30 persen. Inflasi sedang belum membahayakan kegiatan ekonomi, tetapi inflasi ini sudah menurunkan kesejahteraan orang-orang yang memiliki penghasilan tetap.
3. Inflasi Berat : Inflasi berada antara 30-100 persen. Inflasi berat dapat dikatakan sudah bisa mengacaukan kondisi perekonomian.
4. Inflasi Sangat Berat : Inflasi berada di atas 100 persen. Jenis inflasi ini sudah sangat mengacaukan kondisi perekonomian dan susah dikendalikan meskipun dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

Indeks Harga Konsumen (IHK) digunakan untuk mengukur tingkat inflasi/deflasi di suatu negara atau kota dengan menghitung besarnya perubahan IHK suatu bulan tertentu terhadap bulan sebelumnya yang dinyatakan dalam persen. IHK terdiri dari IHK Perkotaan dan IHK Perdesaan. IHK Perkotaan menggambarkan perubahan harga secara umum dari sejumlah (paket) komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga di daerah perkotaan. IHK Perdesaan menggambarkan perubahan harga secara umum dari sejumlah (paket) komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga di daerah perdesaan (level kabupaten). Paket komoditas yang digunakan dalam menyusun IHK

diperoleh dari suatu survei pengeluaran rumah tangga yang biasa disebut Survei Biaya Hidup (SBH).

Sejarah penghitungan laju inflasi di Indonesia diawali dengan Indeks Biaya Hidup (IBH). IBH digunakan di Indonesia sebagai indikator inflasi sejak tahun 1950-an. IBH dihitung berdasarkan perkembangan harga-harga kebutuhan rumah tangga di Jakarta yang berdasarkan paket komoditas sebanyak 62 jenis barang dan jasa hasil SBH yang dilaksanakan tahun 1957-1958. IBH Jakarta dengan dasar Maret 1957-Februari 1958=100 dihitung dan digunakan sebagai indikator adanya laju inflasi hingga Maret 1979.

Mulai April 1979 IBH diganti dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dihitung berdasarkan paket komoditas (sekitar 100-110 jenis barang/jasa) hasil SBH yang dilaksanakan di 17 ibukota provinsi. IHK tersebut dihitung dengan dasar April 1977-Maret 1978=100. Ketujuh belas ibukota provinsi tersebut adalah Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, Kupang, Ujung pandang, Manado, Pontianak, Banjarmasin, Ambon dan Jayapura.

Pada tahun 1988/1989, BPS menyelenggarakan SBH di seluruh ibukota provinsi di Indonesia. Tujuan utamanya adalah memperoleh diagram timbangan (paket komoditas) baru untuk memperbaharui penghitungan IHK 17 kota. IHK dengan dasar April 1988/Maret 1989=100, mulai digunakan sejak April 1990, mencakup 27 ibukota provinsi dengan paket komoditas sekitar 200-224 jenis barang dan jasa.

Pertumbuhan perekonomian Indonesia dalam dasawarsa tahun 90-an yang begitu pesat berdampak pada pendapatan perkapita masyarakat yang meningkat cukup drastis sehingga mengakibatkan pola konsumsi rumahtangga hasil SBH 1988/1989 tersebut telah berubah. Oleh karena, itu BPS memandang

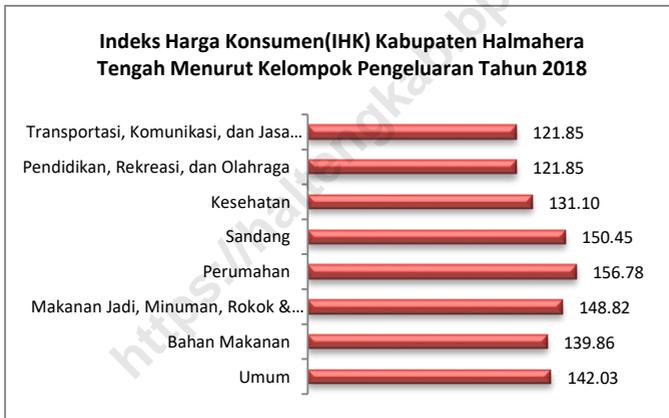
perlu untuk mengadakan SBH yang baru guna mempengaruhi perhitungan IHK, yaitu dengan melaksanakan SBH selama tahun 1996 dan disebut SBH96.

Sejak tahun 1998, perhitungan IHK 43 kota di Indonesia menggunakan tahun dasar 1996 (hasil SBH/SBH Tahun 1996 di 43 kota), dimana perhitungan IHK pada tahun sebelumnya menggunakan tahun dasar 1988/1989 (SBH 1988/1989 di 27 Ibu Kota Provinsi). Sedangkan SBH yang terakhir dilaksanakan adalah pada tahun 2007 guna mempersiapkan penggantian tahun dasar yang baru (2007=100) yang dilaksanakan di 33 Ibu Kota Provinsi dan 33 Kabupaten, dimana di antaranya terdapat 21 kota IHK yang baru. SBH 2007 dilaksanakan di 66 kota yang dilakukan di daerah perkotaan dengan sampel sebanyak 115.830 rumah tangga. Adapun pengukuran laju inflasi dengan menggunakan tahun dasar baru yaitu IHK (2007 = 100), mulai digunakan sejak Juni 2008. Dalam penyajian IHK 2007, jumlah kelompok/sub kelompok yang disajikan tetap terdiri dari 7 (tujuh) kelompok dan 35 sub kelompok.

Mulai Januari 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2012 = 100. Ada beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK baru (2012=100) dibandingkan IHK lama (2007=100), khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2012 yang dilaksanakan oleh BPS, yang merupakan salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Hasil SBH 2012 sekaligus mencerminkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dibandingkan dengan hasil SBH sebelumnya.

SBH 2012 dilaksanakan di 82 kota, yang terdiri dari 33 ibukota provinsi dan 49 kota besar lainnya. Dari 82 kota tersebut, 66 kota merupakan cakupan kota SBH lama dan 16 merupakan kota baru. Survei ini hanya dilakukan di daerah perkotaan (urban area) dengan total sampel sebanyak 13.608 Blok Sensus dan total sampel rumah tangga sebanyak 136.080. SBH 2012 dilaksanakan secara

triwulanan selama tahun 2012 sehingga setiap triwulan terdapat 34.020 sampel rumah tangga. Paket komoditas nasional hasil SBH 2012 terdiri dari 859 komoditas. Paket komoditas terbanyak ada di Jakarta yaitu 462 komoditas, dan yang paling sedikit di Singaraja sebanyak 225 komoditas. Jumlah paket komoditas kelompok inflasi inti (*core*) sebanyak 751 komoditas, kelompok inflasi harga yang diatur pemerintah (*administered prices*) sebanyak 23 komoditas, dan kelompok inflasi bergejolak (*volatile*) sebanyak 85 komoditas. Sedangkan paket komoditas Kota Ternate hasil SBH 2012 sebanyak 397 komoditas, yang terdiri 148 komoditas kelompok makanan dan 249 komoditas kelompok non makanan.



Gambar 2. Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran, Tahun 2018

Sumber : Survei Harga Pedesaan 2018

Berdasarkan gambar diatas, IHK Kabupaten Halmahera Tengah pada akhir tahun 2018 adalah sebesar 142,03 yang artinya secara umum rata-rata harga komoditas di Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2018 telah mengalami kenaikan sebesar 42,03 persen sejak tahun 2012 (tahun dasar). Adapun IHK masing-masing kelompok pengeluaran adalah: kelompok Bahan Makanan 139,86; kelompok makanan jadi, minuman rokok dan tembakau 148,82; kelompok perumahan 156,78; kelompok sandang 150,45; kelompok kesehatan 131,10; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 121,85; serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa perbankan 121,85.



Gambar 3. Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Bulan, Tahun 2018

Sumber : Survei Harga Pedesaan 2018

Kenaikan IHK tertinggi terjadi pada bulan Mei 2018 yaitu sebesar 2,70 persen dengan indeks sebesar 142,27 dimana indeks bulan sebelumnya adalah 138,53. Tingginya kenaikan IHK pada bulan Mei 2018 dipicu oleh kenaikan harga pada kelompok Bahan Makanan yaitu sebesar 5,26 persen. Fenomena yang terjadi adalah bulan tersebut sudah memasuki bulan Ramadhan sehingga bahan-bahan makanan menjadi lebih mahal. Pada bulan tersebut juga terjadi permasalahan diversifikasi barang, yaitu terdapat beberapa kualitas barang yang tergantikan dengan kualitas yang lebih baik. Penurunan IHK terjadi pada bulan Oktober 2018 dengan Indeks sebesar 141,61 sedangkan indeks bulan sebelumnya adalah sebesar 145,21. Penyebab turunnya IHK pada bulan tersebut antara lain karena penurunan IHK pada kelompok bahan makanan yang disebabkan oleh komoditas ikan dan sayur-sayuran yang harganya menurun karena hasil tangkapan ikan oleh nelayan sedang melimpah dan sayur-sayuran sedang musim panen.

Kelompok Komoditi	2017		2018	
	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UMUM	134,49	5,71	142,03	5,61
I. Bahan Makanan	130,85	5,50	139,86	6,89
II. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	143,51	5,85	148,82	3,52
III. Perumahan	146,63	16,67	156,78	6,92
IV. Sandang	138,31	3,35	150,45	8,78
V. Kesehatan	121,04	1,34	131,10	8,31
VI. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	117,42	1,92	121,85	3,77
VII. Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	125,35	-6,48	121,85	-2,79

Tabel 5. IHK dan Laju Inflasi Halmahera Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran, 2018

Sumber: Survei Harga Pedesaan BPS 2018

Besarnya laju inflasi Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2018 yang dihitung berdasarkan pergerakan IHK pada tahun 2018 adalah sebesar 5,61 persen. Jika dibandingkan dengan laju inflasi tahun 2017 yaitu sebesar 5,71 persen, terlihat bahwa laju inflasi Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,1 persen.

Kelompok Sandang merupakan kelompok yang mengalami laju inflasi tertinggi yaitu 8,78 persen. Disusul kemudian oleh kelompok Kesehatan 8,31 persen; kelompok Perumahan 6,92 persen; kelompok Bahan Makanan 6,69 persen; kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga sebesar 9,77 persen; kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau 3,52 persen; sedangkan kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami deflasi sebesar 2,79 persen.

<https://haltengkab.bps.go.id>

BAB 4

Keuangan dan

Perbankan

A. KEUANGAN DAERAH

Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sangat tergantung kepada sumber dana yang dimiliki. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah dituntut untuk menjadi penggerak perekonomian pada daerahnya masing-masing agar dapat terus tumbuh tiap tahunnya. Rencana dan realisasi keuangan daerah secara rinci tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun masa APBD meliputi masa satu tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. APBD terdiri dari tiga poin penting yaitu pendapatan daerah, belanja daerah (pengeluaran daerah), dan pembiayaan daerah.

Pendapatan Daerah (Penerimaan Daerah) bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Lain-lain Pendapatan yang Sah seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain akibat dari penjualan/pengadaan barang/jasa oleh daerah.

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Belanja daerah merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pengeluaran daerah atau belanja daerah digunakan untuk Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga.

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah (pengeluaran pembiayaan). Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit dan harus ditutupi dengan penerimaan pembiayaan. Jika pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan surplus dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah.

Setiap daerah diharapkan memiliki pendapatan yang tinggi dan dapat meningkat secara berkesinambungan, sehingga dana yang dibutuhkan untuk belanja daerah dapat tercukupi dan tidak mengalami defisit dalam arti pengeluaran lebih besar dari penerimaan yang ada.

Penerimaan daerah dalam APBD untuk tahun 2018 ditargetkan memiliki peningkatan dibandingkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan daerah untuk tahun 2018 tercatat naik sebesar 23,17 persen dengan nominal 817 miliar rupiah, sedangkan pada tahun 2017 tercatat 663 miliar rupiah. Apabila dilihat dari sisi pendapatan daerah, terdapat peningkatan sebesar 5,82 persen pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Pada tahun 2017 tercatat sebesar 639 miliar rupiah dan ditargetkan meningkat menjadi 677 miliar rupiah pada tahun 2018. Peningkatan pendapatan ini nyatanya dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 8 miliar rupiah dan dana perimbangan 45 miliar rupiah. Lain-lain Pendapatan yang Sah belum secara signifikan menunjang kenaikan pendapatan daerah karena

mengalami penurunan sebesar 22,4 persen dari angka 68 miliar rupiah pada tahun 2017 menjadi 52 miliar rupiah.

Tabel 6. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (miliar rupiah), 2017-2018

Indikator	2017	2018	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENERIMAAN DAERAH	663,25	817,92	23,17
Pendapatan Daerah	639,41	677,62	5,82
1. Pendapatan Asli Daerah(PAD)	17,02	25	46,92
2. Dana Perimbangan	554,19	598,69	8,03
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	68,20	52,92	-22,40
Pembiayaan Daerah	23,85	140,30	488,38
Pengeluaran Daerah	650,45	816,92	25,59
Belanja Tidak Langsung	275,53	300,35	9,01
1. Belanja Pegawai	166,92	184,62	10,60
2. Belanja Bunga	0	0	-
3. Belanja Subsidi	0	1	-
4. Belanja Hibah	10,07	12,80	27,06
5. Belanja Bantuan Sosial	0	0	-
6. Belanja Bagi Hasil	0,11	1,44	1207,27
7. Belanja Bantuan Keuangan	97,53	98,49	-
8. Belanja Tidak Terduga	0,89	2	124,82
Belanja Langsung	374,92	505,57	34,85
1. Belanja Pegawai	27,19	16,46	-39,47
2. Belanja Barang dan Jasa	180,85	237,93	31,56
3. Belanja Modal	166,88	251,18	50,52
Pembiayaan Daerah	0	11	

Sumber: Publikasi Statistik Keuangan Kabupaten Halmahera Tengah 2018

B. PAJAK DAN RETRIBUSI

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di antaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Secara umum, menurut Dr. Mahfud Sidik, Msc. dalam artikel berjudul *'Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah'*, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah

Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

3. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Penerimaan pembiayaan daerah pada APBD Kabupaten Halmahera Tengah 2017 dianggarkan naik dibandingkan dengan realisasi APBD 2016, yaitu menjadi 68 miliar rupiah pada tahun 2017. Sejalan dengan hal tersebut, maka kontribusi pembiayaan terhadap penerimaan juga mengalami kenaikan dari 0,03 persen pada tahun 2016 menjadi 8,93 persen pada tahun 2017.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu tergantung kepada bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Salah satu langkah yang bisa ditempuh Pemerintah Daerah adalah memberikan kemudahan dalam investasi bagi pihak swasta sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecilnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan kabupaten/kota. Pertama, masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh pemerintah kabupaten/kota, tetapi berada di luar wewenang Pemerintah Daerah tersebut. Kedua, BUMD pada umumnya belum beroperasi secara efisien. Hal ini tercermin dari laba bersih yang dihasilkan. Ketiga, rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat, tercermin dari pendapatan perkapita. Keempat, kurang mampunya Pemerintah Daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan alternatif.

Tabel 7. Persentase Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Jenis Penerimaan, 2017-2018

Jenis Penerimaan	2017	2018*)
(1)	(2)	(3)
PENERIMAAN DAERAH	100,00	100,00
Pendapatan Daerah	96,40	82,83
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2,57	3,06
1 Pajak Daerah	0,20	0,50
2 Retribusi Daerah	1,45	1,26
3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00
4 Lain-lain PAD yang Sah	0,92	1,30
Dana Perimbangan	83,56	73,29
1 Bagi Hasil Pajak	1,47	1,18
2 Bagi Hasil Bukan Pajak	1,70	2,24
3 Dana Alokasi Umum	66,39	54,90
4 Dana Alokasi Khusus	14	14,97
Lain-lain Pendapatan yang Sah	10,28	6,48
Pembiayaan Daerah	3,60	17,17

Sumber : Publikasi Statistik Keuangan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018

Kontribusi PAD 2017 terhadap total penerimaan daerah ditargetkan mengalami kenaikan dibanding PAD 2016, yaitu dari 2,14 persen menjadi 2,53 persen. Jika dilihat dari nilai nominalnya Pendapatan Asli Daerah juga mengalami kenaikan yaitu dari 14 miliar rupiah pada tahun 2016 menjadi 19 miliar rupiah pada tahun 2017 (lihat tabel 6).

Tabel 8. Persentase Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Jenis Pengeluaran, 2017-2018

Jenis Pengeluaran (1)	2017 (2)	2018*) (3)
PENGELUARAN DAERAH	100,00	100,00
Belanja Tidak Langsung	42,35	36,77
1. Belanja Pegawai	25,67	22,60
2. Belanja Bunga	-	-
3. Belanja Subsidi	-	0,12
4. Belanja Hibah	1,55	1,57
5. Belanja Bantuan Sosial	-	-
6. Belanja Bagi Hasil	-	0,18
7. Belanja Bantuan Keuangan	15	12,06
8. Belanja Tidak Terduga	0,14	0,24
Belanja Langsung	57,65	61,89
1. Belanja Pegawai	4,18	2,02
2. Belanja Barang dan Jasa	27,81	29,12
3. Belanja Modal	25,66	30,75
Pembiayaan Daerah	-	1,35

Sumber: Data APBD Halmahera Tengah 2018

Kreativitas pemerintah daerah melihat dan mengembangkan potensi daerah menjadi hal yang mutlak untuk menaikkan pendapatan asli daerah. Halmahera Tengah sebenarnya mempunyai banyak potensi yang dapat dikembangkan. Salah satu contoh sebagai wilayah pesisir pantai, potensi wisata bahari berpeluang sangat besar untuk dikembangkan. Kondisi lingkungan yang belum tercemar ditambah posisi Halmahera Tengah yang berdekatan dengan Kepulauan Raja Ampat membuat nilai wisata Halmahera Tengah cukup tinggi. Pembangunan fasilitas dan akses transportasi menuju daerah wisata wajib hukumnya jika ingin mendongkrak sektor pariwisata. Tentunya tanpa melupakan promosi ke masyarakat luas, terutama melalui dunia maya.

<https://haltengkab.bps.go.id>

BAB 5

Produksi

A. TANAMAN PANGAN

Sektor pertanian Kabupaten Halmahera Tengah didominasi subsektor perkebunan dan perikanan. Sementara subsektor tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, kedelai dan sebagainya lebih banyak diusahakan penduduk pendatang (transmigran). Ada tiga lokasi transmigran di Kabupaten Halmahera Tengah yaitu di Kecamatan Weda Selatan, Weda Tengah, dan Weda Utara.

Kendala perkembangan subsektor pertanian tanaman bahan makanan berikut bisa menjadi pegangan dinas terkait dalam meningkatkan produksi pertanian yaitu: irigasi masih kurang bagus (sawah tadah hujan) mengakibatkan masa tanam hanya sekali atau maksimal dua kali dalam setahun; tingginya serangan hama tidak disertai dengan kemudahan mendapatkan pestisida, harga pupuk maupun pestisida mahal; akses transportasi masih menjadi kendala saat akan memasarkan hasil pertanian terutama di lokasi transmigran Kecamatan Weda Tengah dan Weda Utara.

Pada tahun 2018, produksi padi di Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 2.899,57 ton yang dipanen dari area seluas 798,3 ha atau rata-rata 3,6 ton per hektar. Sedangkan produksi jagung pada tahun yang sama sebesar 4.051,9 ton dengan luas panen 3.521 ha atau rata-rata 1,2 ton per hektar.

B. HORTIKULTURA

Tanaman hortikultura di Kabupaten Ternak yang diusahakan di Kabupaten Halmahera Tengah terdiri dari sapi potong, kambing, babi, ayam lokal, itik, dan itik manila. Data dari Dinas Pertanian dan Peternakan menunjukkan hanya terdapat satu kecamatan yang memelihara sapi potong yaitu kecamatan weda selatan sebanyak 2.814 ekor sapi potong

Berikutnya, mengenai ternak kambing milik masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah berturut-turut yaitu di Kecamatan Patani Utara (1.183 ekor),

Weda Selatan (998 ekor), Weda Tengah (591 ekor), Weda Utara (191 ekor), Pulau Gebe (412 ekor), Patani (1.556 ekor), Patani Barat (986 ekor), dan Kecamatan Weda (374 ekor).

Ternak ayam lokal milik masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah sebagian besar ditenakkan di Kecamatan Weda Selatan (16.451 ekor), Patani (14.283 ekor), dan Patani Barat (13.085 ekor). Ternak itik milik masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah sebagian besar ditenakkan di Kecamatan Weda Selatan 1.225 ekor, Patani Barat 415 ekor, dan Patani 405 ekor.

C. PERIKANAN

Lebih dari 70 persen luas Kabupaten Halmahera Tengah adalah lautan. Maka tidaklah heran potensi perikanan, terutama perikanan laut sangatlah besar. Sampai searing, kegiatan perikanan masih didominasi oleh kegiatan perikanan tangkap. Tingkat pemanfaatan potensi perikanan baru mencapai angka sekitar 23 persen setiap tahunnya dari potensi lestari, sehingga peluang investasi di sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Halmahera Tengah masih sangat terbuka. Komoditas perikanan tangkap di Halmahera Tengah meliputi :

- a) Ikan pelagis besar, seperti ikan tuna, cakalang, tengiri, tongkol
- b) Ikan pelagis kecil, misalnya teri, kembung, layang, selar, julung
- c) Ikan dermersal/ikan karang/ikan dasar, contohnya ikan kerapu, kakap merah, ekor kuning
- d) Udang-udangan, meliputi lobster dan udang
- e) Rumput laut
- f) Teripang
- g) Mutiara dan jenis molusca

Musim ikan di Halmahera Tengah terjadi antara bulan Mei hingga Agustus dengan daerah persebaran ikan dimulai dari perairan Wed hingga ke perairan Patani dan Gebe. Keterbatasan jumlah dan jenis alat penangkap ikan yang tergolong tradisional merupakan salah satu faktor lambatnya pemanfaatan potensi perikanan karena armada tersebut hanya beroperasi di perairan lepas pantai dan tidak bisa menjangkau hingga daerah penangkapan *Zona Economy Exclusive* (ZEE). Untuk memaksimalkan produksi sektor perikanan di Kabupaten Halmahera Tengah, maka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah seperti peningkatan sarana dan prasarana perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya, peningkatan promosi perikanan bagi investor, dan perlindungan terhadap habitat ikan.

Berdasarkan data dari Dinas Perikanan dan Kelautan, jumlah rumah tangga perikanan tangkap Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2016 sebanyak 806 rumah tangga yang terdiri dari 804 rumah tangga di sektor perairan laut dan 2 rumah tangga di sektor perairan umum. Terdapat 245 rumah tangga yang bekerja di sektor budidaya perikanan, Kecamatan Weda Selatan (64 ruta), Weda (43 ruta), Pulau Gebe (16 ruta), Patani Barat (4 ruta), Patani Utara (11 ruta), Weda Utara (4 ruta), Weda Tengah (95 ruta), dan Patani Timur (2 ruta).

Tabel 9. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Halmahera Tengah, 2016 dan 2017

Kecamatan Subdistrict	Perikanan Laut <i>Marine</i> Fisheries		Perairan Umum <i>Inland</i> Water		Jumlah Total	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Weda	134	204	-	-	134	204
2 Weda Selatan	71	71	2	2	73	73
3 Weda Utara	72	71	-	-	72	71
4 Weda Tengah	55	55	-	-	55	55
5 Weda Timur	56	42	-	-	56	42
6 Pulau Gebe	80	66	-	-	80	66
7 Patani	86	86	-	-	86	86
8 Patani Utara	91	91	-	-	91	91
9 Patani Barat	79	79	-	-	79	79
10 Patani Timur	80	73	-	-	80	73
Halmahera Tengah	804	838	2	2	806	840

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Tengah

Menurut data dari Dinas Kelautan dan Perikanan, selama tahun 2017, jumlah perahu tanpa motor yang ada di Halmahera Tengah adalah 404 buah. Sedangkan jumlah motor tempel dan jumlah kapal motor masing-masing sebanyak 634 buah dan 47 buah.

D. PERKEBUNAN

Perkebunan sebagai bagian integral dari sektor pertanian merupakan salah satu sub sektor yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Peranannya terlihat nyata dalam penerimaan devisa negara melalui ekspor, penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku berbagai industri dalam negeri, perolehan nilai tambah dan daya saing serta optimalisasi sumber daya alam secara berkelanjutan.

Komoditas utama sektor perkebunan di Halmahera Tengah adalah kelapa, pala, cengkeh, dan kakao. Hasil tanaman perkebunan sebagian besar diekspor keluar Kabupaten Halmahera Tengah.

Pada tahun 2015, hasil tanaman perkebunan yang dominan di Kabupaten Halmahera Tengah yaitu kelapa dan pala. Jumlah produksi kelapa mencapai 8.757,80 ton dengan luas tanam 10.246 hektar, dan produksi pala sebesar 1.809,80 ton dengan luas tanam 11.098,50 hektar. Sementara itu, luas perkebunan cengkeh selama tahun 2015 adalah 1.490 hektar dengan produksi mencapai 204,2 ton. Untuk tanaman kakao, luas tanam sebesar 3.436 hektar dengan jumlah produksi mencapai 418 ton pada tahun 2015.

Di tahun 2015, dari 10 kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah, Kecamatan Patani Utara merupakan wilayah produksi terbanyak tanaman pala (3.119 ton), kelapa (1.867 ton), dan cengkeh (756 ton). Sedangkan produksi kakao terbanyak berasal dari Kecamatan Patani Barat.

E. KEHUTANAN

Sebagian besar lahan di Kabupaten Halmahera Tengah adalah areal hutan. Kawasan hutan Halmahera Tengah termasuk dalam *Low Land Forest* (hutan pegunungan rendah) dengan komposisi jenis pohon di hutan primer maupun di hutan bekas tebangan dan memiliki potensi keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, baik flora maupun fauna.

Menurut data dari Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Tengah, pada tahun 2017, luas kawasan hutan mencapai 178.887,08 hektar, dengan rincian sebagai berikut :

1. Hutan Produksi sebesar 134.091,76 Ha
2. Hutan Produksi Terbatas sebesar 59.990,66 Ha
3. Hutan Produksi Konversi sebesar 54.390,96 Ha

4. Hutan Lindung sebesar 28 756,31 Ha
5. Taman Nasional Aketajawe sebesar 16.037,95 Ha
6. Air/danau sebesar 839,65 Ha

Realisasi pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dari seluruh perusahaan yang beroperasi pada tahun 2015 mencapai 1,6 milyar rupiah.

Realisasi produksi kayu bulat berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Tengah selama tahun 2015 mencapai 26.313,90 m³. Kelompok kayu rimba adalah yang terbesar produksinya (14.559,76 m³), diikuti oleh kelompok kayu meranti campuran (11.754,14m³).

<https://haltengkab.bps.go.id/>

<https://haltengkab.bps.go.id>

BAB 6

Akomodasi dan

Pariwisata

AKOMODASI DAN PARIWISATA

Potensi pariwisata di Kabupaten Halmahera Tengah didominasi wisata bahari karena kabupaten ini sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pesisir pantai. Berikut adalah beberapa tempat wisata di Kabupaten Halmahera Tengah :

1. Talaga Nusliko

Merupakan danau air payau di Desa Nusliko Kecamatan Weda. Berjarak 1,5 km di sebelah selatan dari pusat kota Weda. Luas danau ini mencapai 4 km², dikelilingi bukit, dan dapat digunakan untuk bersantai, memancing dan lain sebagainya. Pengunjung bisa menggunakan transportasi darat seperti mobil atau ojek sepeda motor.

2. Pulau Imam dan Pulau Dua

Adalah pulau di depan kota Weda, tepatnya didepan pelabuhan Weda, yang berjarak 500 meter dari pelabuhan. Di pulau Imam, terdapat kuburan penduduk dan kuburan leluhur yang dikeramatkan dan biasanya banyak dikunjungi oleh peziarah.

3. Pulau Mnaili dan Pulau Yefi

Pulau Mnaili dan Pulau Yefi terletak di samping pulau Imam. Pulau kecil yang tidak berpenghuni ini dikelilingi laut dangkal yang tenang dan dapat digunakan untuk memancing, *snorkling* dan sebagainya.

4. Taman Laut Tanjung Ulie

Terletak di Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah. Berjarak 27 km dari Kota Weda, dapat ditempuh dengan jalan darat maupun lewat laut. Taman laut ini berdekatan dengan lokasi perusahaan tambang PT. Weda Bay Nickel. Hamparan terumbu karang yang masih terjaga kelestariannya serta ikan yang berwarna-warni memanjakan wisatawan yang berkunjung ke sana.

5. Taman Laut Pasi Gurango dan Pasi Dua

Berjarak 40 km dari pusat kota Weda. Terletak di Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara. Dapat ditempuh melalui jalur laut maupun darat kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Pasi Gurango dan Pasi Dua merupakan pulau karang kecil dengan diameter sekitar 5 meter dan dikelilingi laut dangkal yang memiliki hamparan terumbu karang sepanjang 500 meter yang beraneka warna. Pengunjung juga disugahi pemandangan biota laut yang menawan dan masih alami.

6. Talaga Legaye Lol (Yonelo)

Merupakan sebuah danau air payau yang terletak di kaki bukit Legaye Lol di sebelah barat desa Sagea, Kecamatan Weda Utara. Panjang danau ini sekitar 2,5 km dan lebarnya 2,4 km. Di tengah danau terdapat pulau kecil bernama Yefi. Di dasar danau banyak terdapat kerang berprotein tinggi. Di ujung danau terdapat sebuah makam yang konon merupakan makam keturunan kesultanan Jailolo yang bernama Muhammad Taher.

7. Gua Boki Moruru

Merupakan sebuah gua alam di hulu sungai Sageyen, berjarak sekitar 5 km dari Desa Saga, Kecamatan Weda Utara. Pengunjung biasanya menempuh perjalanan menyusuri sungai Sageyen dengan menaiki perahu kecil atau biasa disebut *katinting* dengan lama perjalanan 30 menit. Nama gua ini diambil dari nama seorang putri yang konon pernah bermukim di kawasan ini. Boki Moruru berarti putri yang menghanyutkan diri. Menurut cerita masyarakat setempat, di sungai Sageyen pernah ditemukan seorang putri dari Kesultanan Tidore yang sedang mandi dan bermain-main sambil menghanyutkan diri mengikuti arus sungai Sageyen hingga ke hilir sungai.

8. Pulau Mtum Ya

Adalah sebuah pulau kecil yang terdiri dari hamparan pasir putih sepanjang 142 meter dan lebar 67 meter. Di dasar lautnya terdapat hamparan terumbu karang yang unik dan eksotik, serta ikan yang cantik menawan. Pengunjung harus menempuh perjalanan selama 2 jam dengan transportasi speedboat menuju Desa Messa, Kecamatan Weda Timur, kemudian baru menuju ke pulau ini dengan katinting dengan lama perjalanan kurang lebih 15 menit.

9. Tanjung Ngolo Popo dan Selat Jailolo

Merupakan sebuah tanjung yang terbentuk dari batu cadas (batu rijang), berlokasi di Desa Kipai, Kecamatan Patani. Tanjung ini berjarak 0,90 mil dari Desa Kipai. Di tanjung ini terdapat makam yang dikeramatkan dan sering dikunjungi peziarah. Sedangkan selat Jailolo memiliki hamparan terumbu karang yang masih alami di dasarnya.

10. Pulau Moor

Adalah sebuah pulau kecil dengan hamparan pasir putih. Berjarak kurang lebih 1 mil dari desa Kipai, Kecamatan Patani dan dapat ditempuh menggunakan transportasi laut dengan lama perjalanan 30 menit. Panjang pulau ini kurang lebih 2 km. Di dekat pantai Pulau Moor, terdapat sebuah danau yang dikelilingi oleh hutan bakau. Pulau ini bagus dijadikan tempat memancing atau *camping*.

11. Pulau Lewo dan Pulau Sayafi

Letaknya tidak jauh dari pantai Patani Utara. Panjang kedua pulau ini kurang lebih 3 km. Pulau ini digunakan sebagai lokasi perkebunan kelapa oleh masyarakat. Dapat digunakan pengunjung untuk memancing atau *camping*.

12. Kepulauan Gebe

Merupakan sebuah gugusan pulau yang terdiri dari Pulau Gebe, Pulau Fau, Pulau Yoi, Pulau Uta dan Pulau Sain. Berbatasan langsung dengan Kepulauan Raja Ampat yang sangat terkenal dengan wisata bawah lautnya di sebelah timur dan selatan. Untuk dapat mengunjungi kepulauan ini, dapat ditempuh dengan perjalanan laut maupun udara. Pulau Yoi merupakan salah satu pulau penghasil kepiting. Di Pulau ini terdapat penangkaran kepiting (ketang kenari) dan ikan yang diusahakan oleh masyarakat setempat. Sedangkan pantai di Pulau Uta sering digunakan penyu sebagai tempat bertelur pada malam bulan purnama.

Selain terdapat banyak tempat wisata bahari, Halmahera Tengah juga kaya akan wisata budaya. Berikut beberapa contoh wisata budaya di Halmahera Tengah :

1. Coka Iba dan Fanten

Merupakan sebuah rangkaian atraksi budaya yang kerap diadakan oleh masyarakat Weda, Patani dan Gebe pada saat bulan Rabi'ul Awal. Pada zaman kesultanan, coka iba merupakan pasukan elit gam range yang ditugaskan menyamar menggunakan topeng. Kini coka iba menjadi sebuah atraksi budaya yang dilakukan pada saat perayaan fanten. Dalam menjalankan atraksinya, para pelaku coka iba menggunakan topeng menyerupai setan, menari diiringi tabuhan rebana dan alunan zikir. Coka iba merupakan perlambang atas kegembiraan alam termasuk setan dan iblis yang turut bersuka cita atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Fanten merupakan sebuah perayaan yang bermakna saling memberi tanpa pamrih dengan tujuan memupuk rasa persaudaraan antar sesama masyarakat gam range (tiga negeri). Konon, di awal perayaannya, melahirkan sumpah leluhur gam range yang terkenal dengan slogan fagogoru. Dalam perayaan fanten, masyarakat

secara bergantian menyajikan makanan untuk disantap oleh saudaranya yang kemudian akan dibalas oleh saudara keesokan harinya dengan menyediakan hidangan yang sama. Puncak perayaan fanten adalah pada tanggal 12 Rabi'ul Awal.

2. Tari Lala

Lala berasal dari kata "*Laila*" diambil dari kalimat "*Lailahaillallah*" yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Lala dalam bahasa Maba mengandung makna sebagai meja hidangan yang sering dilakukan pada upacara adat perkawinan dan upacara adat lainnya. Dari kisah itulah munculah tarian lala dalam sejarah masyarakat Gamrange. Tarian lala ini muncul bersamaan dengan berdirinya negeri Gamrange (Tiga negeri bersaudara) diantaranya adalah Maba, Patani dan Weda. Dalam perspektif sejarah, tarian lala sesungguhnya merupakan tarian khas masyarakat Gamrange yang mengandung unsur-unsur religius hingga sekarang tarian lala dijadikan sebagai sarana budaya dalam mempertemukan dan menyatukan masyarakat Maba, Patani dan Weda (Masyarakat Gamrange).

Ketersediaan jasa akomodasi (hotel) yang memadai berperan penting dalam menunjang industri pariwisata. Sebagai daerah yang baru berkembang, pada tahun 2016 tersedia 14 akomodasi di Kabupaten Halmahera Tengah, dengan jumlah kamar 142 dan tempat tidur sebanyak 242 dan rata-rata tamu yang menginap selama 7 hari. Kebanyakan tamu yang menginap masih tamu domestik. Penginapan ini tersebar di Kecamatan Weda, Weda Selatan, Weda Tengah, dan Pulau Gebe.

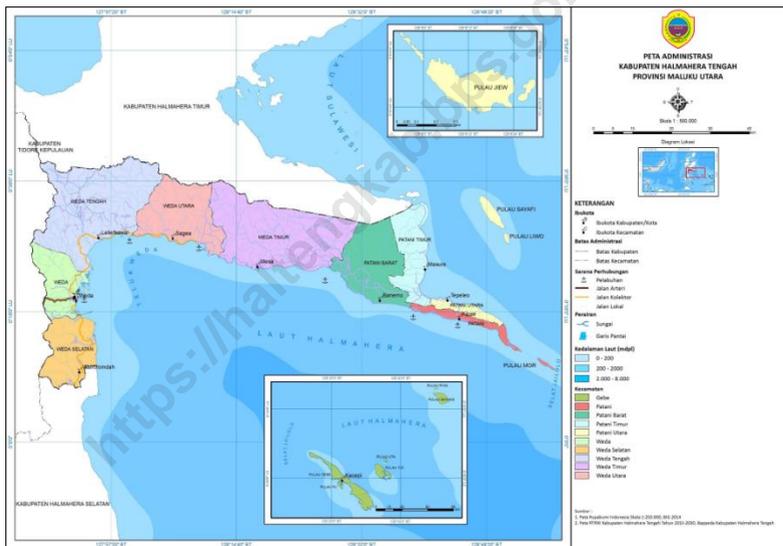
<https://haltengkab.bps.go.id>

BAB 7

Transportasi

A. TRANSPORTASI DARAT

Kabupaten Halmahera Tengah merupakan daerah kepulauan dimana lebih dari 80 persen desa terletak di pesisir pantai. Kondisi transportasi darat yang belum menjangkau semua kecamatan di Halmahera Tengah mengakibatkan transportasi laut menjadi andalan mobilitas penduduk dari daerah satu ke daerah lain. Moda transportasi laut di Kabupaten Halmahera Tengah meliputi kapal motor, kapal kayu dan *speed boat*.



Gambar 4. Peta Kabupaten Halmahera Tengah
Sumber : Halmahera Tengah Dalam Angka 2018

Selain sebagai alat transportasi penumpang, moda transportasi laut juga sebagai alat pemasok berbagai barang kebutuhan masyarakat seperti bahan bakar (solar, bensin, minyak tanah), semen, beras, dan sebagainya. Ekspor berbagai macam hasil perkebunan dan kehutanan masyarakat Halmahera Tengah seperti kopra, kayu, bahkan nikel juga dilakukan melalui jalur laut.

Jalan merupakan sarana transportasi darat yang sangat penting untuk memperlancar aktivitas ekonomi. Kondisi jalan yang baik akan mempermudah

mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari suatu wilayah ke wilayah lain. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Tengah, pada tahun 2018 sekitar 54,73 persen jalan di Halmahera Tengah dengan kondisi baik. Persentase panjang jalan dengan kondisi sedang adalah 6,64 persen. Adapun persentase panjang jalan dengan kondisi rusak adalah 19,94 persen serta sisanya 18,69 persen dengan kondisi rusak berat.



Gambar 5 Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Halmahera Tengah, 2018

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Tengah

B. TRANSPORTASI UDARA

Bandar Udara Gebe merupakan Bandar Udara Kabupaten Halmahera Tengah yang terletak di Kecamatan Pulau Gebe. Bandar Udara Gebe beroperasi sejak tahun 1978 dengan jumlah maskapai hanya satu maskapai. Bandar Udara Gebe mulai beroperasi pada bulan Februari setiap tahunnya karena setiap bulan Januari masih dalam proses pelelangan maskapai yang akan beroperasi selama satu tahun ke depan.

Pada tahun 2018(Maret-Desember 2018), jumlah penerbangan di Bandara Gebe adalah sebanyak 290 penerbangan dengan rata-rata 29 penerbangan setiap bulan. Jumlah penerbangan tertinggi terjadi pada bulan Agustus yaitu 37 penerbangan.

Jumlah penumpang pesawat pada tahun 2018(Maret-Desember 2018) adalah 3.109 orang. Jumlah penumpang tertinggi terjadi pada bulan Agustus yaitu 418 orang sedangkan jumlah penumpang terendah terjadi pada bulan Maret yaitu 162 orang. Adapun banyaknya bagasi dan kargo pada tahun 2018(Maret-Desember 2018) masing-masing adalah 231.509 kg dan 3.353 kg

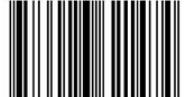
DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
JL. Poros Weda Payahe
Email : bps8202@bps.go.id
Homepage : haltengngkab.bps.go.id

ISBN 978-602-6621-47-4



9 786026 621474